

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)
DI DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

WINDIS JANUARI RAMADHAN

10564 0192 51 4



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)
DI DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan diusulkan oleh

WINDIS JANUARI RAMADHAN
10564 0192 51 4

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)

()

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

()

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

()

4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

()

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Di
Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten
Barru

Nama : Windis Januari Ramadhan

Nomor Stambuk : 10564 0192 51 4

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

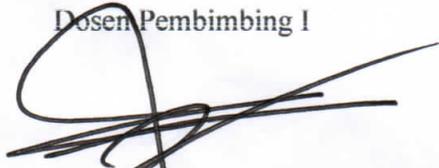
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Setelah diperiksa dan diteliti, telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Dosen Pembimbing II

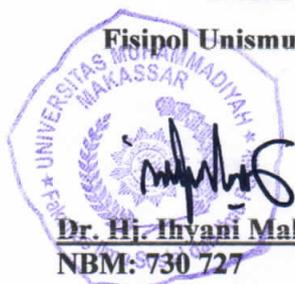


Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan

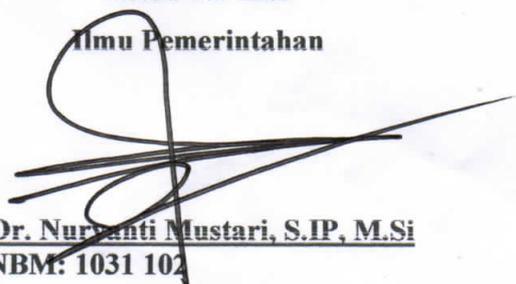
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si
NBM: 730 727

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
NBM: 1031 102

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windis Januari Ramadhan

Nomor Stambuk : 10564 0192 51 4

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 17 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Windis Januari Ramadhan

ABSTRAK

Windis Januari Ramadhan. 2018. Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Handam.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, serta faktor pendorong dan pengambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan Desa. Lokasi penelitian berada di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian studi kasus, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi wawancara langsung terhadap informan berjumlah 8 (delapan) orang yang dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta data lainnya berupa dokumentasi yang dianggap mendukung. Kemudian data tersebut dikumpul disusun secara jelas dan sistematis dalam rangka menyusun skripsi dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Desa Lasitae masih masih tergolong pasif karena hanya menerima dan melaksanakam hasil keputusan musrembang dan bersikap tidak peduli terhadap hasil kebijakan pemerintah, contohnya dalam perbaikan fasilitas umum dan pembangunan lainnya yang bentuk pembangunan fisik karena perempuan tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut akan tetapi perempuan di Desa Lasitae sudah aktif dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seperti ikut serta dalam pelatihan pelatihan kursus tata boga dan menjahit.

Kata kunci : Partisipasi, Perempuan, Musrembang

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah, dan InayaNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibunda **Dr. Nuryanti, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I dan ayahanda **Handam, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **Azis** dan Ibunda **Harlina** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan,

menyemangati dan motivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP yang telah mendampingi dalam penyusunan proposal dan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif ...
6. Kepala Desa Lasitae bersama jajaran dan staff yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Pemerintahan '14 terkhusus IP B sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.

8. Tokoh Pemuda Desa Lasite Terkhusus Hudri Mubaraq dan Abdul Wahid yang sudah mendampingi selama di Desa Lasitae
9. Sahabat-sahabat M. Miftah Aulia, Surya Hardiansyah, Muh. Nur Ilahi, A. Algi Paris yang tak henti-hentinya memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada penulis.
10. Terakhir kepada Kakak saya Dewi Mandasari dan Ade-Ade saya Isna, Putri, Anti dan Nisa yang sudah mensupport saya selama pembuatan skripsi

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Amin ..!!

Makassar, September 2018

Penulis

Windis Januari Ramadhan

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Partisipasi	8
2.2.Konsep Perempuan.....	14
2.3.Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).....	17
2.4.Kerangka Pikir.	26
2.5.Deskripsi dan Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1.Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
3.2.Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
3.3.Sumber Data.....	30
3.4.Informan Penelitian.....	30
3.5.Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.Teknik Analisis Data.....	32
3.7.Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1.Profil Desa Lasitae.....	34
4.2.Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae.....	52
4.3.Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Perempuan Dalam MUSREMBANG.....	66

BAB V PENUTUP	73
5.1.Kesimpulan.....	73
5.2.Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77
Daftar Gambar	
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Daftar kepala Desa Ynag Menjabat.....	34
Tabel 4.2 Luas Wilaya Berdasarkan Penggunaan.....	37
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....	37
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 4.5 Keselarasan Visi dan Misi Pada RPJMD Tahun 2016-2021 Dengan Misi pada Tahun 2017-2023 Desa Lasitae.....	41
Tabel 4.6 Predikisi pendapatan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Desa Lasitae Tahun 2017-2023.....	46
Tabel 4.7 Prediki Alokasi Indikatif Belanja Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Desa Lasitae Tahun 2017-2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) adalah suatu forum musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun oleh lembaga pemerintah dan masyarakat ataupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dilaksanakannya musrembang adalah untuk menyepakati prioritas kegiatan pembangunan yang sudah disusun dalam rencana kerja. Dan setiap tahun awal bulan januari itu diselenggarakan musrembang untuk menyusun rencana kerja pembangunan.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Kemudian dalam teknik pelaksanaannya, berpedoman kepada surat edaran bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan.

Musrembang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin bersama-sama dengan elemen dan unsur masyarakat desa pada waktu tertentu. Guna untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP

Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014, pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut.

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANGDES) secara partisipatif, partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan ikut serta bertanggung jawab di dalamnya.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya "*participation*", atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pengambilan bagian atau

pengikutsertaan. Mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat, Partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif baik untuk menyusun suatu program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program. Jika dilihat dari konteks pembangunan maka partisipasi dalam pembangunan berarti keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki dalam sebuah proses pembangunan (Aprilia, 2015)

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Hendra, 2013 : 3-4)

Partisipasi Perempuan membawa tantangan baru dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Secara umum pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Agar perubahan yang dilakukan dapat

mencapai sasaran dan tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.

Adanya *affirmative action* 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi keterwakilan perempuan dalam ikut serta menentukan pengambilan keputusan. Perempuan sangat diperlukan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan untuk menyampaikan suatu ide-ide ataupun pendapat yang dapat dijadikan suatu pedoman untuk mewujudkan pembangunan. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun realitas kehidupan perempuan dalam pembangunan di Indonesia lebih rendah daripada peran laki-laki. Padahal perempuan Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam forum-forum partisipasi yang di selenggarakan pemerintah desa lasitae yaitu pemerintah memberikan ruang bagi perempuan secara terbuka lebar untuk memaksimalkan perannya. Keterbatasan ruang gerak perempuan di desa lasitae cenderung berasal dari segala lini. Baik dari diri perempuan itu sendiri, lingkungan sekitar, pemerintah setempat, dan kesepakatan tidak langsung mengenai hak perempuan di desa.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam musrembang yang dilakukan di desa lasitae terdapat beberapa masalah diantaranya, perempuan yang datang di musrembang sangat sedikit tidak sampai 50%, dan juga yang hadir hanya menjadi pendengaran dan kurang aktif pada saat musrembang sedang berlangsung.

PKK desa lasitae mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah desa untuk meningkatkan keluarga yang berbudaya, bahagia, maju, mandiri, sejahtera dan harmonis. Serta PKK juga mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu PKK juga sebagai motivator dalam pengembangan potensi masyarakat dan penggerak perkasa gotong royong dalam swadaya perempuan untuk pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Maka dari itu kiprah perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan, karena kaum perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat lebih merata. Dan mengingat jumlah perempuan yang ada di Desa Lasitae sekitar 1043 orang dari 2053 warga yang terdata, maka sangat disayangkan jika besarnya jumlah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik untuk ikut serta dalam proses penyusunan pembangunan (Profil Desa Lasitae Januari 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae?

2.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae

2.4. Manfaat

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan akan adanya manfaat yang positif. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi peneliti

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

b. Bagi dunia akademis

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi dunia akademis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, serta sebagai referensi guna memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan dengan keadaan lahiriah seseorang terhadap sesuatu hal. Partisipasi dapat diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga atau dalam bentuk materiil terhadap suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang melihat seorang individu didalamnya. Partisipasi mengarahkan individu untuk terlibat secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Herlintati, 2012 : 6)

Sejalan dengan itu, Sulaiman Huraerah (Aprilian, 2015 : 24) mengungkapkan partisipasi sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah dan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.

Pendekatan partisipati dalam berbagai konteks, termasuk dalam perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, dimana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat dalam era reformasi tuntutan atas keterbukaan dan

akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan konsekuensi dan komitmen atas prinsip-prinsip demokrasi, karena instrumen perencanaan adalah usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik yang selaras (Mildad, 2013)

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 322004), telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Saragih, 2011: 11)

Menurut Hendra (2016: 3) Partisipasi juga menjadi perdebatan bahwa, apakah partisipasi itu sebagai proses atau tujuan. Proses berarti bahwa partisipasi hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan partisipasi sebagai tujuan dimaksudkan bahwa yang diharapkan dari suatu kegiatan pengembangan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Konsep seperti ini menganggap partisipasi sebagai means (alat) dan sebagai end (tujuan). Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.

3. Melibatkan diri pada kegiatankegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

2.1.1. Bentuk dan Jenis-jenis Partisipasi

Menurut Siagian (Hendra, 2013 : 3-4) bentuk partisipasi masyarakat ada dua, yaitu :

1. Partisipasi Pasif

Merupakan sikap perilaku dan tindak tanduk melakukan hal – hal yang menghalangi kelancaran roda pembangunan.

2. Partisipasi Aktif

- a. Turut memikirkan nasib dengan memanfaatkan lembaga – lembaga yang ada dalam masyarakat sebagai penyalur aspirasi.
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang bersifat formal atau non formal.
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan pemerintah yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan untuk kepentingan bersama.

Menurut Sastropoetro (Agnes dkk, 2016 : 148-151) menyebutkan jenis-jenis partisipasi yaitu partisipasi pikiran (*Psychological participation*), partisipasi tenaga (*Physical participation*), partisipasi keahlian (*Participation with skill*) yaitu:

1. Partisipasi Pemikiran Partisipasi perempuan dalam pemikiran baik itu secara langsung maupun tidak langsung mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terutama di zaman emansipasi wanita saat ini, dimana perempuan turut andil dalam kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi, bagi suatu pembangunan strategi perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat.
2. Partisipasi Tenaga Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari perempuan desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya pada perencanaan pembangunan desa dalam hal musrenbang.
3. Partisipasi Keahlian yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas selain itu tingkat keahlian atau *skill* sangat dibutuhkan oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan keadaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kesukarelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

2.1.2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. dan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan (Saputra, 2015 : 6-7)

(Aprilian, 2015 28), tingkatan partisipasi ada empat sebagai berikut.

a. Berbagi Informasi bersama (sosialisasi)

Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut;

b. Konsultasi/mendapat umpan balik

Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan;

c. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama

d. Masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat memengaruhi hasil/keputusan;

e. Pemberdayaan/kendali Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan

keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Sedangkan Arnstein dalam Muluk (Aprilian, 2015 28-29) memberikan delapan model tangga partisipasi masyarakat yang digunakan untuk mengukur kadar partisipasi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan ladder of participation (tangga partisipasi). Menurutnya, terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian dikerucutkan lagi dan diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi sebagai berikut.

- a. Derajat pertama dan paling rendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas pada tahap ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi, tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan, dan di dalam derajat ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi.
- b. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan adanya partisipasi (tokenism). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman (*placation*).

- c. Derajat ketiga adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik pengambilan keputusan maupun pelayanan publik.

Derajat ini menunjukkan adanya retribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga.

2.2. Konsep Perempuan

Kata wanita dalam etimologi Jawa itu berasal dari ‘wani ditoto’ alias berani diatur. Menurut Dictionary Zoetmulder (Riyani dkk, 2015 :22) kata wanita berarti ‘yang diinginkan’. Arti kata perempuan dari bahasa asalnya, Sansekerta, berasal dari kata per-empu-an. Per itu berarti makhluk, Empu berasal 22 dari kata Sansekerta yang berarti mulia, berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur bangsa ini pun sudah memberikan makna dalam kata perempuan sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada kaum wanita (Riyani dkk, 2015 : 22)

Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional adalah dengan pemberdayaan. Pada pendekatan pemberdayaan ini, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi tawar perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek/peaku aktif, sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk

meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang konkrit untuk memberdayakan perempuan itu secara lebih baik (Pratama, 2013: 12).

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada level kebijakan kebijakan publik secara kuantitas masih dirasa kurang, sementara proporsi jumlah perempuan lebih besar dari pria. Dengan demikian, secara kuantitas pula perempuan yang lebih banyak “menikmati” produk dari kebijakan publik yang lebih banyak dibuat oleh kalangan pria. Perebutan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik merupakan tuntutan yang wajar karena perempuan adalah sasaran kebijakan publik yang tidak memiliki daya tawar sehingga mengakibatkan terjadinya banyak produk yang tidak ramah gender. Penyebabnya tak lain karena secara internal, individu yang membuat produk kebijakan adalah kaum pria yang relatif mengetahui kebutuhan-kebutuhan sesama, namun tidak sebaliknya kepada para kaum perempuan (Riyani dkk, 2015 : 23)

2.2.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera (Agnes dkk, 2016 : 147)

Pada forum PKK yang dipelopori oleh Ketua PKK terdapat dua jenis rapat, yaitu rapat bulanan dan rapat situasional. Rapat bulanan ini diadakan setiap tanggal 1 setiap bulannya bersamaan dengan kegiatan rutin PKK. Apabila ada

hal-hal yang akan disampaikan dapat disampaikan pada kegiatan rutin PKK. Selain itu, terdapat pula rapat situasional, dimana rapat ini diadakan berdasarkan situasi-situasi yang mendesak, seperti pada saat akan ada kunjungan dari kecamatan untuk membahas program kerja PKK maka akan diadakan pertemuan yang sifatnya tidak di agendakan sebelumnya (Agnes dkk, 2016 : 147)

Menurut (Pratama, 2013 :13-14) Terdapat beberapa faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu sebagai berikut;

1. Peran serta pemerintah, Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bagaimanapun dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai *power* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
2. LSM, saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peren nyata yang dilakukan LSM terutama dalam pemberdayaan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah.
3. Pembentukan *Local Community Organization* oleh perempuan, akan meningkatkan posisi *bargaining* perempuan. Di samping itu ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.

4. Koperasi, koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memperdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh kredit.

2.3. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG)

Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) desa merupakan kegiatan dalam rangka untuk merumuskan perencanaan didalam pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 menyebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya (Musrembang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa. Pada dasarnya musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan desa. Jadi inti dari musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat atau pihak berkepentingan (Stakeholders) di dalam pembangunan desa (Masruhen dkk, 2013 : 5-6)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) adalah sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya setiap elemen desa baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat agar

perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan daftar keinginan elit desa belaka (Aprilian, 2015 : 23)

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Forum resmi yang dijadikan sebagai tempat musyawarah masyarakat bertempat di balai desa, dengan pembahasan seperti RPJM-desa, PNPM Mandiri, program dari dinas transmigrasi, dan program-program lainnya (Agnes dkk, 2016 : 146)

Musrenbang ini dilaksanakan setiap setahun sekali untuk mencari masukan bagi perumusan perencanaan desa, dan usulan untuk perencanaan pada level atasnya. Pelaksanaan musrenbang di Desa memang masih didominasi oleh elit desa dalam pengambilan keputusan. Musrenbang memiliki beberapa tahapan dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, serta dihadiri oleh perwakilan Dusun biasanya diwakili kepala dusun, seluruh kaur, BPD, LPM, dan perwakilan organisasi masyarakat seperti karang taruna (Agnes dkk, 2016 : 146)

Adapun petunjuk teknis/penyelenggaraan Musrenbang didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap

pelaksanaan. Forum musyawarah tersebut harus melibatkan masyarakat desa, yang artinya perencanaan pembangunan desa harus bersifat partisipatif. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan desa agar nantinya pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat (Sandy, 2015: 24).

2.3.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan, perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur-unsur penting didalamnya (Masruhen dkk, 2013 : 5)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan. Perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan (Huraerah, 2011 : 79)

Di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga baik dalam proses maupun manfaatnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui landasan yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memastikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuan dari PUG yang merupakan komitmen nasional maupun internasional ini adalah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan (Ekawati, 2010 : 27)

Menurut Abe (Apriliani, 2015 :20-21), dalam melakukan suatu perencanaan yang baik maka harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Apa yang akan dilakukan, yakni jabaran misi dan visi;
- b. Bagaimana mencapai hasil tersebut;
- c. Siapa yang akan melakukan;
- d. Lokasi aktifitas;
- e. Kapan akan dilakukan dan berapa lama;
- f. Sumber daya yang dibutuhkan.

Lebih lengkap pendapat yang dikemukakan oleh Syamsi dalam Surjono dan Nugroho, bahwa perencanaan yang baik dan lengkap harus memenuhi 6 (enam) unsur sebagai berikut.

1. Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan;
2. Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
3. Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
4. Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);
5. Kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/timing yang tepat dalam pelaksanaannya;
6. Siapa (*who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subyek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa yang menjadi obyek pelaksana kegiatan.

Santoso dan Gianawati (Masruhen dkk, 2013 : 6-7), mengemukakan bahwa didalam kegiatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat akan membawa manfaat, yaitu:

- a. Efisien, karena sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan serta pelibatan masyarakat sejak awal membantu perencanaan yang disusun tepat sasaran;

- b. Efektif, karena masyarakat lokal lebih memahami kondisi, potensi dan permasalahannya, serta kebutuhannya lebih teridentifikasi;
- c. Menjamin kemitraan, karena akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku pembangunan, sehingga dialog dan konsensus akan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama;
- d. Memberdayakan kapasitas, terjalin lewat upaya negosiasi (dialog) dan pengelolaan pembangunan;
- e. Memperluas ruang lingkup, karena masyarakat akan memahami tanggung jawabnya dan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan;
- f. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, karena akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan;
- g. Berkelanjutan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan;
- h. Memberdayakan kelompok marjinal, karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat mengambil peran dalam menentukan kegiatan pembangunan yang tepat untuk mereka;
- i. Meningkatkan akuntabilitas, karena jika dilakukan secara sungguh-sungguh akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (akuntabilitas) terhadap pemerintah.

2.3.2. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam (MUSREMBANG)

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih baik cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam sebuah lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam sebuah lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut (Agnes dkk, 2016 : 153-154) Adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dibedakan menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal.

a. Faktor Internal Pendorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya hal yang mendorong untuk

berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kemauan dan kemampuan perempuan itu sendiri. Apabila perempuan sudah sadar mengenai arti pentingnya perencanaan pembangunan itu, maka mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat.

b. Faktor Eksternal Pendorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.

Selain faktor internal dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terdapat faktor eksternal yang juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan tidak timbul begitu saja, melainkan ada hal-hal eksternal yang mendorong kemauan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, seperti halnya pengaruh dari orang lain dan kebijakan pemerintah melalui program kerja PKK. Pengaruh dari orang lain merupakan hal yang begitu mendorong bagi perempuan untuk berpartisipasi, karena terkadang kemauan untuk berpartisipasi timbul setelah orang lain memberikan pengaruh yang terus menerus.

Adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dibedakan menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dimana norma-norma dalam pemerintah desa yang cenderung mendahulukan kepentingan laki-laki seperti dalam pendidikan, pendidikan dianggap tidak penting bagi

perempuan karena perempuan pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki suara untuk mengambil keputusan. Selain itu, tingkat penghasilan keluarga yang rendah (ekonomi), sehingga mengharuskan perempuan untuk membantu mencari nafkah mengakibatkan tidak adanya waktu bagi perempuan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Adapun secara eksternal yaitu tidak diberikannya ruang atau kesempatan oleh pemerintah desa bagi para perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, karena anggapan proses pembangunan hanya dilakukan oleh para laki-laki. Serta faktor budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat pedesaan dimana perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga. (Agnes dkk, 2016 : 153-154)

2.4.Kerangka Pikir

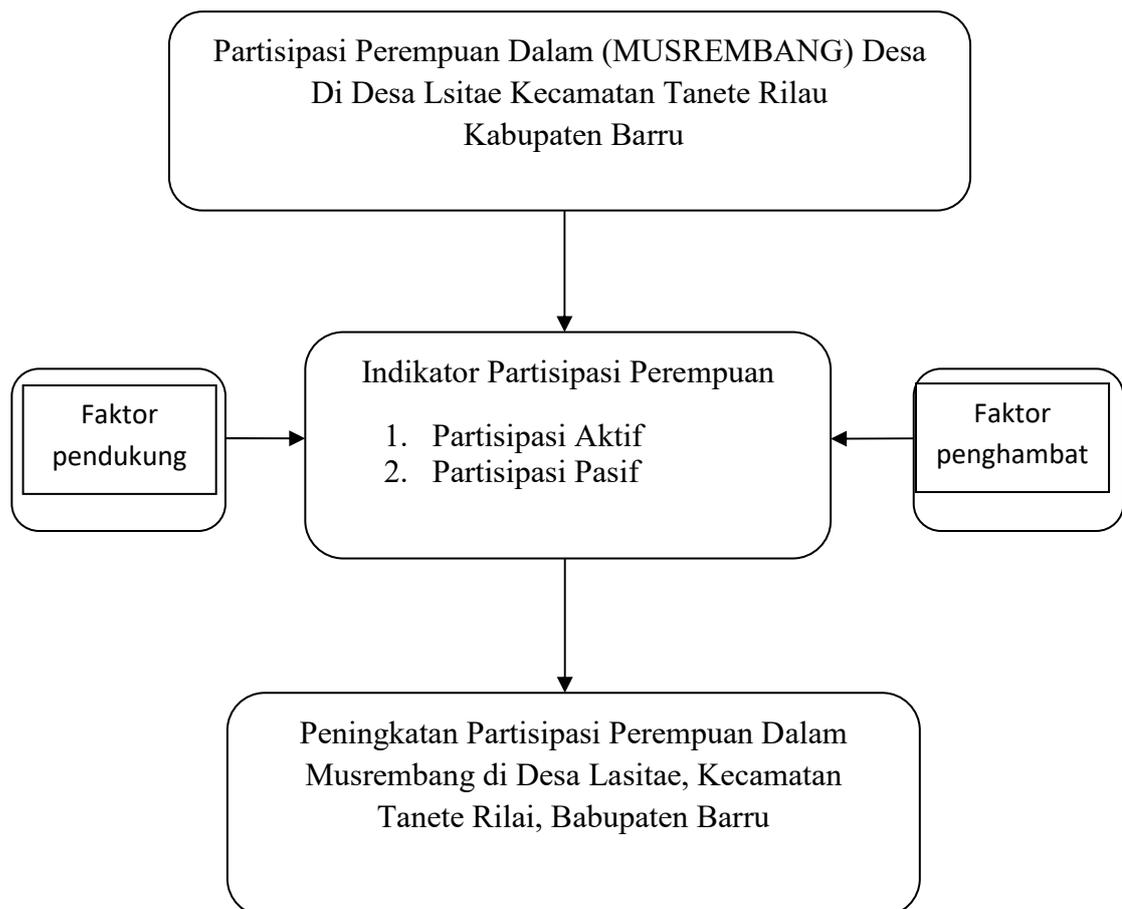
Kerangka pikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, berdasarkan judul penelitian tersebut maka kerangka berpikir dalam penelitian ini secara garis besarnya adalah partisipasi perempuan begitu penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG)

Berdasarkan bentuk teori-teori yang ada di atas, yaitu partisipasi dalam perencanaan dapat dijelaskan bahwa partisipasi perempuan di dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan ini hakikatnya hanya meliputi penentuan tujuan oleh perempuan dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam pengambilan

keputusan, Perempuan dapat menyumbangkan partisipasinya melalui partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi keahlian.

Dimensi tersebut dianggap cocok dalam mengatasi permasalahan mengenai partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) desa di desa lasitae kecamatan tanete rilau kabupaten barru, dengan menggunakan dimensi tersebut peneliti bisa melihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam musrembang. Adapun skema kerangka pikir dapat dilihat pada bagan di bawah ini

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka Pikir

2.5. Deskriptif dan Fokus Penelitian

Yang menjadi deskriptif dan fokus penelitian dalam partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah;

6. Partisipasi Pasif

Merupakan sikap perilaku dan tindak tanduk melakukan hal – hal yang menghalangi kelancaran roda pembangunan. Yaitu bersifat pasif dengan hanya menerima dan melaksanakan setiap hasil keputusan dalam musrembang dan tidak mempersoalkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

7. Partisipasi Aktif

Partisipasi Aktif yang dimaksud yaitu kegiatan warga dalam ikut serta menentukan kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan desa demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain yaitu mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran atau kritik tentang suatu kebijakan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru Kecamatan Tanete Tilau Desa Lasitae. Topik yang diteliti adalah tentang Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa. Lokasi penelitian ini yaitu di kantor Desa Lasitae, Kabupaten Barru, karena data ataupun dokumen-dokumen dapat diperoleh di kantor Desa Lasitae dan untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan harus terjun langsung ke desa lasitae, penelitian ini direncanakan akan berlangsung dua bulan.

3.2. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono: 2014).

2. Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif.

3.3. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi yang di peroleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

3.4. Informan

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan kunci diambil dari Kantor Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru serta aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah dengan hal ini di gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Inisial	Instansi	Jabatan	Ket
1	Kartini Baharuddin	KB	Kantor Desa	Kepala Desa	1
2	Antahira	A	Kantor Desa	Sekretaris Desa	1
2	Darna	D	Kantor Desa	Kader Desa	1
4	Muh. Arsyad	MA	BPD	Ketua BPD	1
5	Fatimah	F	PKK	Ketua	1
6	Saripuddin	S	LSM	Ketua	1
7	Anti	A	-	Masyarakat	1
8	Fitriani Yunus	FY	-	Masyarakat	1

Berdasarkan tabel kerangka pikir diatas penulis memasukkan sebanyak 8 informan dengan rincian, 3 oarang dari perangkat desa, ketua BPD, Ketua PKK, ketua LSM, dan 2 orang dari masyarakat. Penulis menganggap jumlah tersebut sudah mampu memeberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneitian adalah mendapat data. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu;

1. Observasi

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Proses penelitian diperlukan adanya persiapan wawancara. Persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahapan-tahapan tertentu yakni sebagai berikut. Tahap, ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada suatu saat pilihan hanya berkisar di antara beberapa orang memenuhi persyaratan.

Tahap kedua, ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan informan . karena informan adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya. Tahap ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010 : 201) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dekumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatur dan sebenarnya.

3.6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan maupun kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Guna menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah

secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

3.7. Keabsahan Data

Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara, yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi metode yaitu bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratan.
- c. Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Profil Desa Lasitae

Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah wilayah dari kerajaan kecil yang dipimpin oleh kerajaan Tanete.

Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah kerajaan Tanete di masukkan dalam wilayah ONDER AFDELLING Barru, yang bernaung dibawah AFDELLIND PARE-PARE, sebagai kepala pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, dan Bekas Kerajaan Tanete tersebut diberi status sebagai self Bestuur ((Pemerintahan Keraan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun di bidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Kerajaan tanete ini bekas selg bestuur di dalam Afdelling Pare-pare yaitubekas Selh\ f Bestuur Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, Daerahnya sekarang menjadi 3 kecamatan, masing-masing kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 24 Februari 1990 merupakan tongkat sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barrudengan ibu kota Barru berdasarkan Undang-undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi Selatan, maka seiring dengan

kelahiran Kabupaten Barru resmi pula kelahiran Desa Pancana yang merupakan bagian dari Kabupaten Barru.

Pada tahun 1995 desa pancana di mekarkan menjadi 2 desa yaitu desa pancana sendiri dan desa persiapan lasitae. Desa lasitae awalnya membawahi 3 dusun namun pada bulan agustus tahun 2009 bertambah lagi satu dusun yaitu dusun Belleanging.

Sepanjang sejarah pemerintahan desa, desa lasitae tongkat estafet kepemimpinan di desa lasitae sejak di mekarkan pada tahun 1995 telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa dengan periode masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Yang Menjabat

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1995-1997	M. Amir Dg. Mapata	Periode Pertama
2	1997-2000	Ar. Malaka	Periode Kedua
3	2000-2005	Muh. Saeni	Periode ketiga
4	2005-2008	Abidin	Pelaksana Tugas
5	2008-2014	Abdul Azis Samaun	Periode Keempat
6	2014-2017	Antahira	Pelaksana Tugas
7	2017-sekarang	Kartini Baharuddin	Periode Kelima

Sumber Data: Diolah

4.1.1 Keadaan Demografi

a. Luas dan batas wilayah administrasi.

Desa Lasitae kecamatan tanete rilau kabupaten baru adalah salah satu desa yang terletak di pesisir pantai barat kecamatan tanete rilau kabupaten barru, provinsi sulawesi selatan dengan garis pantainya 1 km luas wilayah desa Lasitae 10,7 km, jika dilihat dari letak geografisnya desa Lasitae terletak di antara 17 dan 3" BT, jarak antara ibukota desa dengan ibu kota kabupaten barru sebesar kurang lebih 17 km lewat darat dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu kurang lebih 30 menit desa Lasitae memiliki jarak dari ibukota kecamatan tanete lauk kurang lebih 7 km dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit desa Lasitae memiliki jarak dari ibukota provinsi sulawesi selatan kurang lebih 85 km dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam.

Secara administratif desa Lasitae terbagi atas empat dusun dan 7 RT yaitu dusun butung, 2 RT dusun bujung Lompo 2 RT, dusun Putianging 2 RT, dusun Belleangig 1 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan desa Pancana
- 2) sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pangkep
- 3) sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanete riaja dan kecamatan Pujananting
- 4) sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar

Desa Lasitae disebut juga dengan Duppa matanna kabupaten barru karena merupakan daerah perbatasan kabupaten barru dengan kabupaten pangkajene kepulauan dan merupakan desa lintas provinsi (Trans Sulawesi) yang terletak antara kota makassar dan kota pare-pare.

a) Tofografi

Desa Lasitae mempunyai ketinggian antara 0-2000 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan lainnya merupakan daerah kepulauan.

b) Hidrologi

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hayat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya di mana potensi sumber air di desa Lasitae yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan, dan aliran sungai.

c) Klimatologi

Tipe iklim di desa Lasitae yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan kering berturut-turut 5-6 bulan (April-September) dengan hari hujan sebanyak 2 hari.

d) Penggunaan Lahan

Berdasarkan pemanfaatan lahannya secara umum dapat dibagi menjadi 7 kategori besar yaitu:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Tanah Pemukiman	13.901 Ha
2	Tanah Persawahan	16.44 Ha
3	Tanah Perkebunan	150 Ha
4	Tanah Hutan	841 Ha
5	Tanah Tambak	14.93 Ha
6	Tanah Tegalan	85 Ha
7	Tanah Pekarangan	11.70 Ha

Sumber Data: Diolah

b. Struktur Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di desa Lasitae dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Dusun	Agama				Jumlah
		Islam	Kristen	Hindu	Budha	
1	Butung	844	0	0	0	844
2	Bujung Lompo	523	0	0	0	523
3	Pulau Putianging	505	0	0	0	505
4	Belleanging	189	0	0	0	189
	Jumlah	2053	0	0	0	2053

Sumber Data: Diolah

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa agama islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat desa Lasitae dengan presentasi sebesar 100%.

4.1.2 Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Lasitae dikategorikan terbelakang di sebanding desa lainnya. sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius jika pemerintah ingin memajukan pendidikan di desa ini dapat tingkat pendidikan di Desa Lasitae diketahui melalui data berikut

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Dusun				Jumlah
		butung	Bujung Lompo	Putianging	Belleanging	
1	Belum Sekolah	99	52	60	26	237
2	Masih Sekolah	96	59	40	29	224
3	T.T. SD	77	50	20	5	160
4	Tamat SD	241	199	255	95	790
5	Masih SMP	41	28	23	11	13
6	T.T. SMP	3	4	6	-	13
7	Tamat SMP	85	37	42	8	172
8	Masih SMA	32	25	11	2	70
9	T.T SMA	5	15	-	-	20
10	Masih SMA	87	47	23	5	162
11	Kuliah	30	4	4	-	38
12	S1	48	3	13	-	46
	Jumlah	844	523	505	181	2.053

Sumber Data: Diolah

Dari data dapat dilihat bahwa distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak punya ijazah atau belum tamat SD sebanyak 160 orang sedangkan tamat Sd yakni 790.

b. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di desa Lasitae cukup memadai hanya saja tenaga medisnya perlu ditambah yang lebih profesional lagi, sehingga ketika ada orang yang tiba-tiba menderita pada malam hari cepat ter tangani oleh pertolongan pertama sama tenaga medis yang tersedia di desa Lasitae. Karena penyakit yang biasa diderita oleh warga adalah penyakit diare atau muntaber dan demam berdarah yang terkena musibah semua harus cepat terlayani secara darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa fatal. Apalagi dengan adanya pelayanan kesehatan gratis yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengobatan baik push to maupun di rumah sakit secara merata tanpa membeda-bedakan derajat sosial.

Sarana pelayanan kesehatan di desa Lasitae telah tersedia 1 unit bangunan semi permanen puskesmas pembantu (pustu) dan pelayanan posyandu di empat dusun yang tersebar di desa Lasitae maupun bangunannya masih sangat sederhana tetapi pelayanan secara rutin setiap bulan yaitu penimbangan bayi, pemberian makanan bergizi, vitamin A, pemberian susu bagi balita dan pemeriksaan bagi bumil serta penyuluhan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4.1.3 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan desa yang ingin dicapai dalam 6 tahun mendatang visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan desa yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru.

Dengan mempertimbangkan keadaan desa permasalahan pembangunan dan mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Kepala Desa lasitae hasil pemilihan kepala desa tahun 2016 maka fisik desa lantai tahun 2017-20203 adalah:

“Rumusan visi Desa lasitae, Terwujudnya Desa Lasita yang Maju Mandiri Sejahtera dan Bermartabat”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan desa lasita selama tahun 2017 2023 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut:

Maju

“Berarti kehidupan masyarakat lebih baik dalam aspek ekonomi sosial “

Mandiri

“Berarti mampu membangun desa dengan menggali pendayagunaan potensi desa lasitae “

Sejahtera

“Berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa”

Bermartabat

“Berarti penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adil dan demokratis”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang akan yang ada di desa lasitae yang akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pencapaiannya tujuan dari visi desa. Adapun misi yang telah dirumuskan yaitu:

- a) meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
- b) meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- c) mengupayakan menciptakan desa aman dan menyamankan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat bermasyarakat
- d) meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah Dusun masing-masing

Misi dalam RPJM desa tahun 2017-2023 ini harus selaras dengan RPJM RPJP

kabupaten baru tahun 2016-2021 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.5

Keselarasan Visi dan Misi Pada RPJMD Tahun 2016-2021 Dengan Misi pada Tahun 2017-2023 Desa Lasitae

RPJMD 2017-2023	RPJMD 2016-2021
VISI	
Terwujudnya desa lasita yang maju Mandiri Sejahtera dan bermartabat	Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju Sejahtera Taat asas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan.
Misi	
Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Misi 1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Misi 2 Meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat	Misi 2 Meningkatkan kecerdasan dan Profesionalisme
Misi 3 Mengupayakan menciptakan desa aman dan menyamankan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat bermasyarakat	Misi 3 Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah di tingkat Nasional Regional dan Internasional

<p>Misi 4 Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah Dusun masing-masing</p>	<p>Misi 4 Menciptakan lingkungan yang kondusif</p>
	<p>Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (Good Governance)</p>

Sumer Data: Diolah

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 6 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada rumusan prioritas masalah berdasarkan visi dan misi dan rumusan masalah yang ada maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 6 tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1: meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Tujuan: terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran: meningkatnya kualitas fungsi pemerintah dan aparat desa.

Misi 2: meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

tujuan: meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

sasaran: meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sumber daya manusia untuk kemandirian masyarakat desa.

Misi 3: mengupayakan menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat

tujuan: meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

sasaran: terpenuhinya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 4: meningkatkan rasa sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah di Dusun masing-masing

Tujuan: meningkatnya daya saing desa.

Sasaran: terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata sosial budaya olahraga

d. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan Prioritas pembangunan 6 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan pembangunan desa berdasar pada visi dan misi desa lasitae yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Misi 1: meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan yang menjamin efektivitas efisiensi dan kepuasan masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparat desa
- 4) meningkatkan peran lembaga-lembaga desa

- 5) meningkatkan peran peningkatan kualitas fungsi legislasi perencanaan dan pengawasan
- 6) Peningkatan pengelolaan program kegiatan yang transparan akuntabel dan partisipatif.

Misi 2: meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang terkait dengan meningkatkan SDM dan SDA diarahkan pada:

- a) Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM
- b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan
- c) Pemanfaatan SDA secara maksimal.

Misi 3: mengupayakan menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat

Kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang terkait rasa aman dan kenyamanan diarahkan pada:

- a) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- b) Peningkatan fungsi linmas
- c) peningkatan gotong royong masyarakat
- d) perlindungan penyandang stabilitas.

Misi 4: meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata sosial budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah Dusun masing-masing.

Kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang terkait sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan agama dan wisata sosial budaya olahraga diarahkan pada:

- a) menggerakkan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang ekonomi kesehatan pendidikan agama wisata sosial budaya dan olahraga
- b) pengembangan lembaga ekonomi Desa lembaga petani dan nelayan
- c) pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga lembaga ekonomi
- e. Arah Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan pendapatan Desa kebijakan pendapatan Desa tahun 2017 2023 yang merupakan potensi desa dan sebagai penerimaan Desa Lasitae yg sesuai urutannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dari sektor Pendapatan asli desa dan dana perimbangan.

Dalam struktur anggaran desa shitali terdapat beberapa pos pendapatan desa dan merupakan sumber keuangan Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa maka 6 tahun kedepan pemerintah Desa lantai akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan Desa khususnya yang bersumber dari usaha BUMN di samping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri.

Sumber-sumber pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa lantai terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli Desa
- 2) Bagi hasil pajak Kabupaten
- 3) Bagian dari retribusi Kabupaten

- 4) Alokasi Dana Desa
- 5) Dana desa
- 6) Bantuan keuangan dari pemerintah Pemerintah provinsi Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya
- 7) Hibah
- 8) Sumbangan pihak ketiga

Adapun prediksi pendapatan Desa lasitae dari beberapa sumber di atas untuk 6 tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

**Prediksi pendapatan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Desa Lasitae
Tahun 2017-2023**

Uraian Pendapatan	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Desa	2.115.502.033	2.411.941.611	2.664.064.611	2.925.335.231	3.033.508.111	3.236.391.911	3.342.095.511
Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	0	0
Dana Desa	834.563.200	990.832.100	1.190.832.100	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
Alokasi Dana Desa	1.228.810.000	1.392.629.600	1.444.743.700	1.496.841.500	1.604.729.100	1807.591.000	1.913.292.500
Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	27.019.372	28.479.911	28.488.811	28.493.731	28.779.011	28.800.911	28.803.111

Sumber Data: Diolah

f. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan untuk memastikan bahwa kebijakan belanja Desa memiliki kontribusi yang berarti dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan dan proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan harus akan terus dilakukan peningkatan program-program yang ber orientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Penggunaan anggaran berbasis pada Prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi desa.
- 4) Alokasi anggaran Desa indikatif Berdasarkan kemampuan keuangan Desa, visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja Desa lasitae selama periode tahun 2017-

2023 sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Desa Lasitae Tahun 2017-2023

Uraian Pendapatan	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Desa	2.115.502.033	2.411.941.611	2.664.064.611	2.925.335.231	3.033.508.111	3.236.391.911	3.342.095.511
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	504.562.841	723.582.483	799.219.383	874.850.199	907.302.063	968.167.203	999.878.313
Belanja Bidang pelaksanaan pembangunan	1.163.257.975	1.205.970.805	1.332.032.305	1.458.083.665	1.512.170.105	1.613.612.007	1,666.463.855
Belanja Bidang pembinaan Masyarakat	91.522.600	120.597.082	133.203.232	145.808.366	151.217.012	161.361.200	166.646.387
Belanja Pemberdayaan masyarakat	134.702.151	361.791.241	399.609.691	446.593.001	462.818.933	493.251.503	509.107.058

Sumber Data: Diolah

g. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih

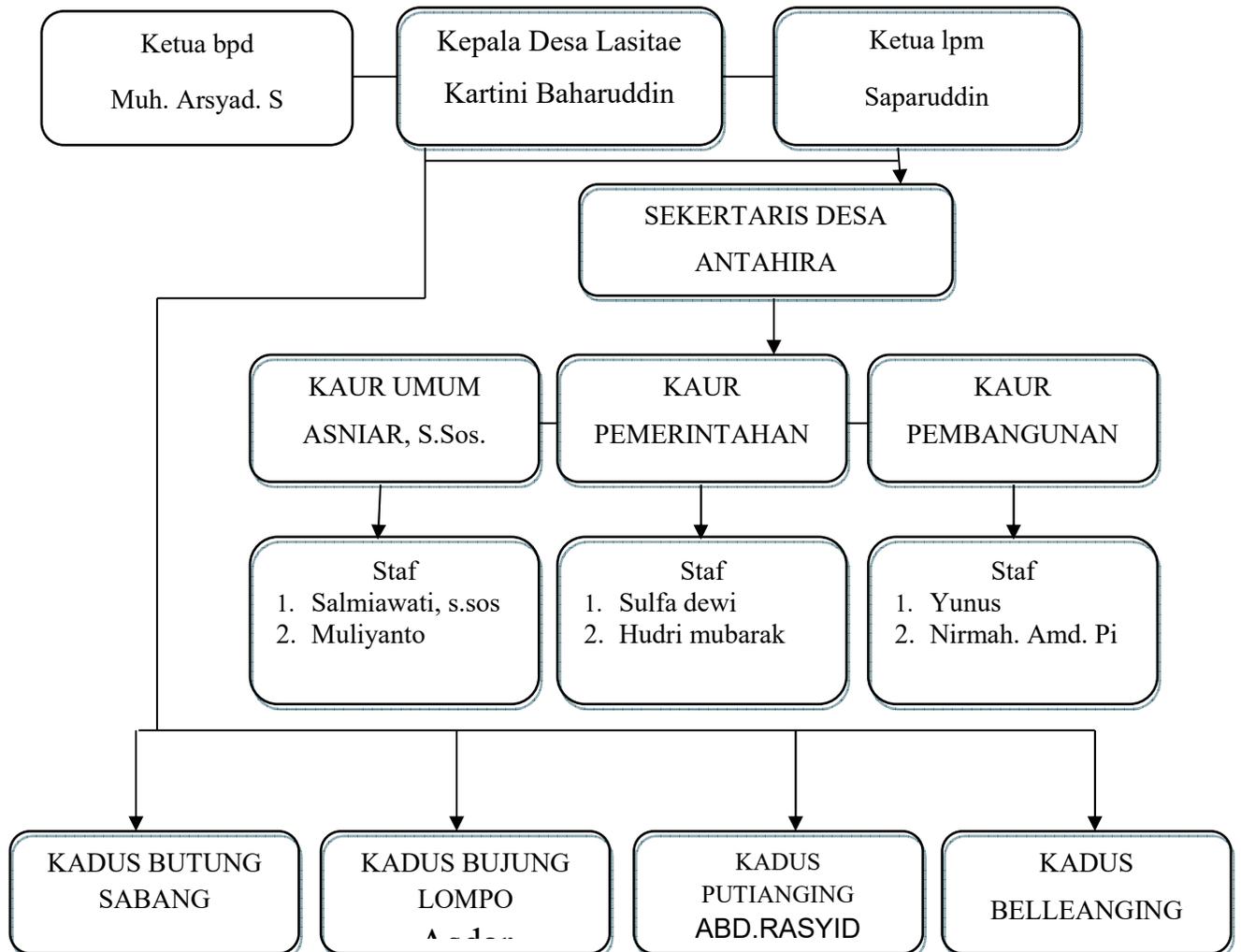
besar dibandingkan belanja untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk mengeluarkan pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada UMR yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dan pengusaha kecil, menengah di desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil lab yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam pelayanan melayani masyarakat.

h. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang merinci pembagian aktivitas kerja dan bagaimana berbagai tingkat aktivitas saling berhubungan satu sama lain dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka batasan-batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan dapat menjadi jelas. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing serta memudahkan mengendalikan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dibuat sebaik mungkin agar memudahkan pegawai atau karyawan lebih mudah mengetahuinya.

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru**



Gambar 4.1

Struktur Pemerinthan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

4.2. Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa di Desa Lasitae

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) adalah suatu forum musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun oleh lembaga pemerintah dan masyarakat ataupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dilaksanakannya musrembang adalah untuk menyepakati prioritas kegiatan pembangunan yang sudah disusun dalam rencana kerja. Dan setiap tahun awal bulan Januari itu diselenggarakan musrembang untuk menyusun rencana kerja pembangunan.

Musrembang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) desa yang dilaksanakan secara rutin bersama-sama dengan elemen dan unsur masyarakat desa pada waktu tertentu. Guna untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD.

Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan, perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur-unsur penting didalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretaris Desa Lasitae tentang Musrembang Desa mengemukakan bahwa :

“Musrembang ini kan forum yah tentu dillaksanakan musrembang ini untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan dan tidak ada perbedaan semua masyarakat di berikan kesempatan untuk bertanya.” (Wawancara dengan A. Tanggal 15 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara ditambahkan oleh Kepala BPD Desa Lasitae mengemukakan bahwa:

“Dalam musrembang kita membahas dari bagaimana proses perencanaanya, bagaimana sistemnya dan membahas juga mengenai biaya atau dana yang tersedia, setelah semua telah dibahas pada saat musrembang tentu kita gampang mengetahui mana saja nanti yang akan direalisasikan. Maka dari itu perlu adanya skala prioritas agar supaya gampang mengetahui mana saja yang lebih cocok dibangun duluan.” (Wawancara dengan MA. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah mengikuti aturan tentang pelaksanaan

musrenbang dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Dan menjadikan Musrenbang sebagai tempat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada level kebijakan kebijakan publik secara kuantitas masih dirasa kurang, sementara proporsi jumlah perempuan lebih besar dari pria. Dengan demikian, secara kuantitas pula perempuan yang lebih banyak “menikmati” produk dari kebijakan publik yang lebih banyak dibuat oleh kalangan pria. Perebutan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik merupakan tuntutan yang wajar karena perempuan adalah sasaran kebijakan publik yang tidak memiliki daya tawar sehingga mengakibatkan terjadinya banyak produk yang tidak ramah gender. Penyebabnya tak lain karena secara internal, individu yang membuat produk kebijakan adalah kaum pria yang relatif mengetahui kebutuhan-kebutuhan sesama, namun tidak sebaliknya kepada para kaum perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretaris Desa lasitae tentang Musrenbang Desa mengemukakan bahwa :

“Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam ikut serta berpartisipasi pada saat musrenbang akan tetapi yang terlihat kemarin saat musrenbang peserta laki-laki lebih dominan dan cenderung lebih aktif dibanding peserta perempuan yang masih kurang.” (Wawancara dengan A. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak lagi dipermasalahkan mengenai jenis kelaminnya karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama

dalam berpartisipasi walaupun antusiasme perempuan itu sendiri masih rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih baik cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya,

suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam sebuah lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam sebuah lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua PKK desa lasitae tentang musrembang bahwa :

“Iya, tentu usia sangat mempengaruhi Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa, karena usia produktif tentu jauh lebih aktif dibandingkan dengan usia di bawah umur atau usia yang bisa di katakan sudah manula ataupun sudah tua. Nah tentu kalau dibandingkan tingkat partisipasinya pasti berbeda dengan yang usia produktif pasti aktif dan yang usia manula pasti tingkat partisipasinya rendah.” (Wawancara dengan F. Tanggal 15 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara ditambahkan oleh Kepala BPD Desa Lasitae mengemukakan bahwa:

“Iya, bisa saja usianya produktif tetapi isinya nol bagaimana mau ikut berpartisipasi yah. Walaupun usianya produktif akan tetapi pengetahuannya sempit pasti dia tidak mengerti partisipasi itu apa dan lainnya. Sebaliknya walaupun usianya sudah tua tetapi pengetahuannya luas dan berpendidikan tinggi pasti pengetahuannya sangat besar dalam berpartisipasi pada saat Musrembang seperti memberikan saran ataupun masukan dalam pembangunan yang cocok untuk desa.” (Wawancara dengan MA. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa usia adalah faktor utama dalam partisipasi karena dapat dilihat bahwa usia produktif cenderung lebih aktif dan mantap dalam berpartisipasi pada saat musrembang, selain usia produktif pendidikan juga menjadi salah satu poin penting dalam berpartisipasi sebagaimana yang di kemukakan oleh Ketua LPM bahwa:

“Tentu pendidikan seseorang sangat berpengaruh didalam berpartisipasi didalam musrembang, kita bisa melihat cara dia menyampaikan masukan atau usulan-usulan misalnya bagaimana dia ikut serta memberikan pendapat atau menanggapi. Nah biasanya orang yang berpendidikan tinggi pengetahuannya luas dan lebih aktif didalam kegiatan apapun baik itu musrembang dan kegiatan lainnya.” (Wawancara dengan S. Tanggal 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa pendidikan juga menjadi salah satu poin penting dalam tingkat partisipasi seseorang karena yang berpendidikan tinggi pasti memiliki pengetahuan yang luas dan tingkat partisipasinya pasti jauh lebih aktif.

4.2.1 Partisipasi Aktif

Perempuan sangat diperlukan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan untuk menyampaikan suatu ide-ide ataupun pendapat yang dapat dijadikan suatu pedoman untuk mewujudkan pembangunan. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun realitas kehidupan perempuan dalam pembangunan di Indonesia lebih rendah daripada peran laki-laki. Padahal perempuan Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan

- a. Turut memikirkan nasib dengan memanfaatkan lembaga – lembaga yang ada dalam masyarakat sebagai penyalur aspirasi.
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang bersifat formal atau non formal.
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan pemerintah yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan untuk kepentingan bersama.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Lasitae mengemukakan bahwa :

“Kalau untuk sekarang partisipasi yang seharusnya 30% keterlibatannya perempuan dalam berpartisipasi itu belum terlihat. Seperti yang kemarin di musrembang saja bisa terlihat bahwa perempuan yang hadir sangat sedikit.

Bahkan yang hadir Cuma beberapa kader desa dengan PKK itu yang hadir cuman ketua dan beberapa anggotanya sangat sedikit sekali kalau berbicara 30% itu sangat masih jauh dari yang diharapkan.” (Wawancara dengan KB. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di desa lasitae masih rendah dan belum efektif dalam memberikan saran atau masukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREBANG) berlangsung

pemberdayaan ini, diasumsikan bahwa jika ingin memperbaiki posisi tawar perempuan, Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional adalah dengan pemberdayaan. Pada pendekatan maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek/peaku aktif, sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi bargaining perempuan adalah melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang konkrit untuk memberdayakan perempuan itu secara lebih baik

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga

guna mewujudkan keluarga sejahtera. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekertaris Desa lasitae tentang Musreimbang Desa mengemukakan bahwa :

“Untuk saat ini pemerintah desa fokus pada pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tetapi kalau saat ini perempuan hanya terlibat di dua bidang pertama dibidang pembinaan masyarakat misalnya pembinaan PKK, mejadi kader posyandu, dan pembinaan kelompok tani perempuan dan lain-lain, sedangkan di pemberdayaan masyarakat ada latihan kelompok perempuan seperti latih kursus menjahit dan pelatihan kursus tata boga.” (Wawancara dengan A. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa perempuan desa lasitae hanya aktif dalam bidang pemberdayaan dan sangat antusias dalam berpartisipasi di dalamnya.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu sebagai berikut;

1. Peran serta pemerintah, Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bagaimanapun dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai power untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
2. LSM, saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peren nyata yang dilakukan LSM terutama dalam pemberdayaan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah.
3. Pembentukan Local Community Organization oleh perempuan, akan meningkatkan posisi bargaining perempuan. Di samping itu ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan

mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.

4. Koperasi, koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memperdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh kredit. Sebagaimana yang di kemukakan pada saat wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu

Kader Desa Lasitae yang mengatakan bahwa :

“saat ini perempuan juga aktif dalam bidang pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pembinaan masyarakat kami sebagai kader desa beserta staff desa melakukan pembinaan kelompok masyarakat, pembinaan PKK, pembinaan oprasional karang taruna dan pembinaan kelompok tani perempuan, kalau untuk di pemberdayaannya ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan PKK, pelatihan kursus menjahit dan pelatihan tata boga” (Wawancara dengan D. Tanggal 16 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara juga ditambahkan oleh Masyarakat Desa Lasitae mengemukakan bahwa:

“Kalau di bidang pemberdayaan masyarakat kami pernah di utus oleh desa untuk pergi ikut kursus menjahit di kabupaten selama hampir tiga bulan dan setelah itu kami juga diberikan bantuan berupa mesin jahit, dan sekarang ada pelatihan tata boga.” (Wawancara dengan A. Tanggal 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa walaupun perempuan tidak terlibat langsung dengan sektor pembangunan akan tetapi perempuan dalam hal ini sudah aktif ikut serta dalam berpartisipasi di bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

**Bentuk perbandingan tingkat partisipasi
laki-laki dan perempuan dalam musrembang**

no	Keterangan	Laki-laki	Perempuan
1	Tingkat kehadiran	Kehadiran laki-laki lebih banyak dan dapat mewakili semua unsur yang ada di masyarakat	Kehadirannya sangat terbatas hanya mewakili undangan sebagai perwakil kelompok perempuan (PKK)
2	Keterlibatan dalam susunan kepanitiaan	Masih mendominasi dalam posisi yang strategis (ketua)	Masih terbatas kebanyakan masih menduduki posisi yang terkait dengan hal-hal praktis dan teknis (komsumsi, administrasi) untuk posisi yang strategis masih jarang
3	Keterlibatan dalam kegiatan musrembangdes	Keterlibatannya sangat aktif dalam memberikan usulan-usulan terkait dalam musrembang	Belum terlalu aktif dalam memberikan usulan pada saat musrembang.

4.2.2. Partisipasi Pasif

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Forum resmi yang dijadikan sebagai tempat musyawarah

masyarakat bertempat di balai desa, dengan pembahasan seperti RPJM-desa, PNPM Mandiri, program dari dinas transmigrasi, dan program-program lainnya.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan. Perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan.

Partisipasi Pasif Merupakan sikap perilaku dan tindak tanduk melakukan hal – hal yang menghalangi kelancaran roda pembangunan yaitu mendukung jalannya pemerintah dalam rangka menciptakan kidupan negara yang sesuai tujuan. Adapun bentuk partisipasi pasif antara lain yaitu bagaimana menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua PKK Desa Lasitae tentang Musrembang Desa mengemukakan bahwa :

“Ibu PKK setiap tahunnya selalu hadir sebagai peserta musrembang, karena dengan hadirnya kami itu sudah mengetahui desa kita nanti apa saja yang dibangun tetapi karena setiap musrembang yang menjadi topik pembahasannya selalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan lain-lain jadi tanpa usulan tanpa perempuan sudah pasti hal itu dibangun.” (Wawancara dengan F. Tanggal 15 Agustus 2018)

Hal ini juga berkesesuaian dengan penjelasan yang dilakukan oleh ketua BPD desa Lasitae :

”Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan

tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak, dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya” (Wawancara dengan A. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan terbilang pasif karena hanya menerima keputusan hasil musrembang begitu saja dan juga biasanya hanya kepala dusun yang menjadi perwakilan masyarakat dalam musrembang karena sebelumnya kepala dusun sudah terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Hal ini senadah dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu salah satu anggota PKK ibu Surianti mengatakan bahwa :

“Karena di Musrembang biasanya pembahasannya lebih pembangunan fisik jadi yang lebih aktif bapak-bapaknya dan kita sebagai perempuan biasanya jadi penonton saja. Karena kami sebagai perempuan tidak mengerti soal pembangunan-pembangunan jadi kami perempuan biasanya pada saat Musrembang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat saja.” (Wawancara dengan S. Tanggal 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa perempuan selalu sepakat terhadap usulan-usulan yang telah di tetapkan pada saat musrembang dan perempuan selalu beranggapan bahwa tanpa usulan dari mereka pasti pembangunan tetap di realisasikan.

Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku, dan tindakan tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi pasif dapat dikatakan juga sebagai partisipasi yang hanya berorientasi pada output, dalam musrembang bisa diinterpretasikan sebagai sikap peserta musrembang yang menerima segala bentuk keputusan mengenai hasil musrembang.

Kesadaran untuk andil dalam pembangunan sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ketetapan sasaran dalam pembangunan harus menjadi prioritas utama. Dan yang paling penting dalam proses pembangunan adalah sinergi antara pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat. Keberhasilan pembangunan adalah seluruh tanggung jawab bersama dan diharapkan akan muncul suatu gerakan sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan pembangunan tidak akan melengser dari apa yang telah digariskan dalam tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Lasitae tentang Musrembang Desa mengemukakan bahwa :

“Kalau untuk perempuan sejauh ini belum ada yang bisa dilakukan di pembangunan itu sendiri. Karena memang pembangunan saat ini fokus terhadap pembangunan fisik saja sehingga perempuan susah untuk ikut berpartisipasi, saya sebagai masyarakat desa dan diutus secara langsung sebagai suatu kelompok masyarakat ketika musrembang bingung mau ikut berpartisipasi bagaimana. Kalau pembangunan saja fokus terhadap pembangunan fisik apalagi kita sebagai perempuan tidak bisa berbuat banyak.” (Wawancara dengan FY. Tanggal 16 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara juga ditambahkan oleh Masyarakat Desa Lasitae mengemukakan bahwa:

“Tahun kemarin saya tidak hadir di musrembang desa jadi saya tidak begitu paham tentang musrembang yang kemarin itu pengalaman pertama saya ikut

“mungkin selanjutnya saya sudah bisa menyampaikan pendapat saya di musrembang.” (Wawancara dengan S. Tanggal 16 Agustus 2018)

Dari informasi diatas melalui wawancara peneliti dengan kedua informan dapat dianalisis bahwa sejauh ini keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan belum terlihat keaktifannya. Dan dapat dilihat perempuan yang hadir dalam musrembang masih terlibang pasif karena masih ada yang mengikuti musrembang dan belum memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang musrembang itu sendiri.

4.3. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam MUSREMBANG

Adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dibedakan menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal Pendorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.

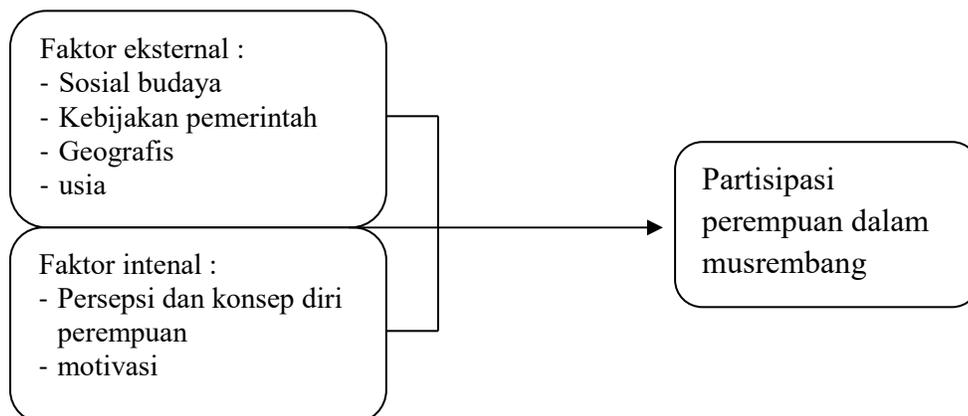
Keikutsertaan dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya hal yang mendorong untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kemauan dan kemampuan perempuan itu sendiri. Apabila perempuan sudah sadar mengenai arti pentingnya perencanaan pembangunan itu, maka mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat.

b. Faktor Eksternal Pendorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.

Selain faktor internal dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terdapat faktor eksternal yang juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan tidak timbul begitu saja, melainkan ada hal-hal eksternal yang mendorong kemauan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, seperti halnya pengaruh dari orang lain dan kebijakan pemerintah melalui program kerja PKK. Pengaruh dari orang lain merupakan hal yang begitu mendorong bagi perempuan untuk berpartisipasi, karena terkadang kemauan untuk berpartisipasi timbul setelah orang lain memberikan pengaruh yang terus menerus.

4.3.1. Faktor pendukung



Keikutsertaan dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya hal yang mendorong untuk berpartisipasi. Salah

satu diantaranya adalah faktor kemauan dan kemampuan perempuan itu sendiri. Apabila perempuan sudah sadar mengenai arti pentingnya perencanaan pembangunan itu, maka mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan perempuan Desa Lasitae, yang merupakan lokasi penelitian ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Lasitae tentang Musrembang Desa mengemukakan bahwa :

“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah menghimbau kepada masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program bantuan untuk mendirikan usaha dan mensukseskan jalannya pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas umum dan kepentingan bersama Selain masyarakat diberi ruang dalam menyampaikan pendapatnya tentang program-program apa yang harus dijalankan oleh pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kerja sama antara masyarakat yang ada di desa dan dapat membangun desa sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan”

Senada dengan hal itu informan lain mengemukakan bahwa :

“pemerintah Desa selalu mendorong masyarakat secara umum dan perempuan secara khusus untuk aktif dalam berpartisipasi pada saat musyawarah desa ataupun musrembang, dan kami juga pemerintah desa kadang terjun langsung untuk mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan mendengarkan saran ataupun masukan tentang pembangunan yang cocok terhadap perempuan” (Wawancara dengan KB. Tanggal 15 Agustus 2018)

Selanjutnya hasil wawancara juga ditambahkan oleh Masyarakat Desa Lasitae mengemukakan bahwa:

“memang benar pemerintah desa selalu memperhatikan keterlibatan perempuan dalam musrembang, kita juga masyarakat desas lasitae khususnya perempuan sadar bahwasanya untuk memajukan desa keterlibatan perempuan juga sangat dibutuhkan apalagi dalam hal kemampuan dan keterampilan perempuan juga tidak kalah dengan laki-laki kita harapkan dengan keterlibatan perempuan ini sedikit banyaknya bisa membantu desa dalam mencapai tujuannya dalam hal pembangunan” (Wawancara dengan SD. Tanggal 16 Agustus 2018

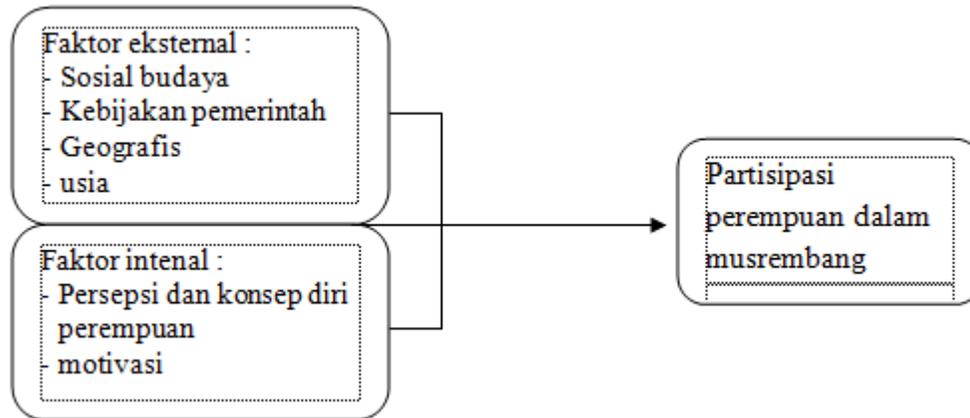
Dari informasi diatas melalui wawancara peneliti dengan kedua informan dapat disimpulkan bahwa dalam musrembang pemerintah desa sudah memberikan kesempatan kepada perempuan dalam berpartisipasi aktif pada saat musyawarah, hal ini juga ditunjukkan dengan perempuan yang antusias dalam ikut forum musyawarah dan perempuan sadar bahwa keterlibatan mereka sangat diperlukan.

Hal lain juga disampaikan oleh masyarakat desa lasitae tentang faktor pendukung dalam musrembang , berikut penjelasan yang diberikan :

“Hal yang paling penting buat berpartisipasi itu ya kemauan sama kemampuan, kalau ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan ya tidak bisa, soalnya kegiatan musyawarah itu harus bisa bantu buat ngelola, ngasih sumbangan ide, kan percuma kalau cuma mau aja gak ngapa-ngapain di forum itu kan buang-buang waktu...”

Berdasarkan informan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Lasitae, dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa kemauan dan kemampuan dalam diri perempuan-perempuan tersebut. Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan di Desa Lasite, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

4.3.2. Faktor penghambat



Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikutsertaan perempuan di dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Faktor penghambat ini terdiri dari faktor internal dan eksternal.

secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dimana normanorma dalam pemerintah desa yang cenderung mendahulukan kepentingan lakilaki seperti dalam pendidikan, pendidikan dianggap tidak penting bagi perempuan karena perempuan pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki suara untuk mengambil keputusan. Adapun secara eksternal yaitu tidak diberikannya ruang atau kesempatan oleh pemerintah desa bagi para perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, karena anggapan proses pembangunan hanya dilakukan oleh para laki-laki. Serta faktor budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat pedesaan dimana perempuan hanya bertugas

mengurus rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua PKK Desa lasitae tentang Musrebang Desa mengemukakan bahwa :

“Saya rasa tidak ada perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki didalam menyampaikan pendapat, saran atau masukan-masukan, tetapi kita bisa lihat sendiri bahwa perempuan itu banyak pekerjaan-pekerjaan lain ataupun kewajiban lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti mengurus anak suami dan pekerjaan rumah tangga lainnya itu salah satu faktor yang membuat tingkat partisipasi perempuan lebih rendah.” (Wawancara dengan F. Tanggal 15 Agustus 2018)

Hal lain disampaikan oleh salah satu masyarakat desa lasitae yang mengatakan

bahwa :

“Partisipasi perempuan di Desa Lasitae di setiap Dusun masih kurang aktif dalam mengikuti rapat seperti musrebang karena kebanyakan perempuan masih bersifat acuh tak acuh dalam mengikuti rapat karena suara perempuan masih kurang didengar Dalam pelaksanaan Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat desa, kami selaku tokoh perempuan masih kurang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan karena kebanyakan yang saya liat pada waktu musrebang hanya suara bapak-bapak yang lebih banyak di dengar bahkan suara kami sebagai perempuan kadang didengar tapi lebih banyak yang diabaikan”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrebang adalah banyaknya kewajiban lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti mengurus rumah tangga. Sedangkan pendapat yang kedua menjelaskan bahwa perempuan kurang berpartisipasi karena dalam proses musrebang suara perempuan kurang di dengar berbeda dengan pendapat bapak-bapak, walaupun berkontribusi maka suara perempuan kadang didengar tapi lebih banyak yang diabaikan.

Selain faktor diatas letak geografis suatu wilayah/desa ternyata juga memiliki peran dalam partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut juga terjadi pada perempuan di Desa Lasitae sebagaimana yang di katakan oleh Kepala Desa Lasitae bahwasanya :

“Ada satu dusun di desa lasitae yang letaknya di daerah kepulauan. Selain itu, Kondisi jarak tempu dari Dusun ke desa yang sulit, dan menjadi faktor penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada saat musrembang terutama perempuan” (Wawancara dengan KB. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa ternyata dalam musrembang faktor geografis juga menjadi salah satu faktor penghambat perempuan desa lasitae untuk ikut serta berpartisipasi pada saat musrembag.

Faktor lain juga yang menghambat proses musrembang desa adalah permasalahan dana, hal ini disampaikan oleh staff desa lasitae :

“ Pada dasarnya Musrembang di Desa Lasitae memang hampir setiap tahun dilaksanakan namun banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak usulan masyarakat yang belum diterima karena alasan keterbatasan dana dari pemerintah dan banyak program-program pembangunan desa sampai sekarang belum terlaksana” (Wawancara dengan AH. Tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa ternyata permasalahan dana juga menjadi salah satu penghambat dari terlaksananya program musrembang . namun hal ini sekarang sudah tertutupi dengan adanya program 1 milyar per –desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif :

Partisipasi perempuan di Desa Lasitae hanya aktif dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat seperti ikut serta dalam pelatihan pelatihan kursus tata boga dan menjahit, namun dalam bidang pembangunan belum terlihat keaktifannya karena pemerintah fokus terhadap pembangunan fisik.

2. Partisipasi Pasif :

Partisipasi perempuan Desa lasitae masih tergolong pasif karena hanya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musrembang dan bersikap tidak peduli terhadap hasil kebijakan pemerintah, contohnya dalam perbaikan fasilitas umum dan pembangunan lainnya yang bentuk pembangunan fisik karena perempuan tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut sehingga mereka langsung setuju terhadap hasil kebijakan pemerintah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan agar supaya bisa lebih meningkatkan partisipasinya pada saat musrembang.

2. PKK harus lebih aktif lagi dalam memberikan motivasi kepada perempuan untuk lebih aktif lagi menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum tertentu.
3. Sebelum musrembang dilaksanakan pemerintah desa harus memberikan informasi jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya musrembang agar masyarakat khususnya perempuan lebih bisa mempersiapkan diri.
4. Agarsupaya pemerintah meminimalisir faktor faktor yang bisa menghambat partisipasi perempuan dalam musrembang dan mengoptimalkan faktor faktor pendukung partisipasi perempuan dalam musrembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Dkk. (2016). *“Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurusan Sosiologi”. Jurnal Empirika Vol 1 (2)
- Aprilyani, Dwi. Sandi. (2015). *“Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”*. (Skripsi S-1 Ilmu Administrasi Negara). Universitas: JEBER.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ekawati, Sri. (2010). *“Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010”*. (Skripsi S-1 Jurusan Sosiologi). Universitas Sebelas Maret SURAKARTA.
- Hendra, Nofriko. (2013). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan”. Jurnal Jom Fisip. Vol 3 (2)
- Herlitanti. (2012). *“Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi Di Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah* Jurusan Ekonomi”
- Huraerah, Abu. (2011). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Masruhen, Dkk. (2013). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2013 (Studi Di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggara Kabupaten Bondowoso)*. Jurusan Ilmu Administrasi”. Vol 1 (1)
- Mildad, Jamal. (2013). *“Sistem Komunikasi Pemerintah Melalui Musrenbang Dalam Pembangunan Agama Masyarakat Di Kabupaten Aceh Utara* Jurusan Komunikasi Islam”
- Napitupulu, Marganda. Houdson. (2013). *“Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik”. Jurnal Jom Fisip. Vol 2 (2)
- Prtama, Crisvi. (2013). *“Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis* Jurusan Kebijakan Dan Manajemen Publik”. Vol 1 (1)

- Riyani, Dkk. (2015). "*Peranan Organisasi Pkk Untuk Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan* Jurusan Pendidikan Pkn". Vol 3 (1)
- Saputra,Wandi. (2015). "*Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2015* Jurusan Ilmu Pemerintahan"
- Saragih, M. Tomy. (2011). "*Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan* Jurusan Sasi". Vol 17 (3)
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bamdung: Alfabeta

**L
A
M
P
I
R
A
N**

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Lasitae



2. Kepala Desa Beserta Staff Desa



3. Wawancara Dengan Ketua BPD



4. Wawancara Dengan Ketua LPM



5. Wawancara Dengan Ketua PKK



6. PESERTA MUSREMBANG





RIWAYAT HIDUP

WINDIS JANUARI RAMADHAN, dilahirkan di salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Barru tepatnya di Desa Lasitae Dusun Bujung Lompo pada tanggal 10-10-1996. Penulis merupakan anak tunggal dari buah kasih pasangan

Ayahanda Asis dan Ibunda Harlina. Penulis mengawali pendidikan formal mulai pada tahun 2002 di SD Inpres No 46 Bujung Lompo dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tanete Rilau dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Manokwari dan tamat pada tahun 2014. dan Pada tahun sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1).

Berkat Rahmat Allah SWT dan iringan doa dari keluarga serta teman-teman. Perjuangan panjang penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul; **Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**